



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 194 TAHUN 2016

TENTANG

**ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA  
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN,  
DAN KELUARGA BERENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai rujukan formasi pegawai dalam perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 227 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN, DAN KELUARGA BERENCANA.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Badan Diklat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas pada SKPD/UKPD atau yang ditugaskan Gubernur di luar SKPD/UKPD.
13. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas.

14. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi;
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah;
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana;
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

#### Analisis Jabatan

##### Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
- (2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana dalam kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

#### Bagian Kedua

#### Analisis Beban Kerja

##### Pasal 3

- (1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi kebutuhan PNS berdasarkan kebutuhan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BAB III  
KEGUNAAN

Pasal 4

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk :
  - a. perencanaan kebutuhan PNS;
  - b. rekrutmen calon PNS;
  - c. penempatan PNS;
  - d. pengendalian PNS;
  - e. pendidikan dan pelatihan PNS;
  - f. pengembangan PNS; dan
  - g. kesejahteraan PNS.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh :
  - a. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana;
  - b. BKD;
  - c. Badan Diklat; dan
  - d. Biro ORB.

BAB IV  
RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
  - a. nama jabatan;
  - b. kode jabatan;
  - c. unit organisasi;
  - d. kedudukan dalam struktur organisasi;
  - e. ikhtisar jabatan;
  - f. uraian tugas;
  - g. bahan kerja;
  - h. perangkat/alat kerja;
  - i. hasil kerja;
  - j. tanggung jawab;
  - k. wewenang;
  - l. korelasi jabatan;
  - m. kondisi lingkungan kerja;
  - n. risiko bahaya;
  - o. syarat jabatan;
  - p. prestasi yang diharapkan; dan
  - q. butir informasi lain.

- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana sesuai dengan beban kerja jabatan.
- (4) Hasil penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penerimaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana setelah mendapat validasi dari Biro ORB.

## BAB V

### KEWENANGAN

#### Pasal 6

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro ORB.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak lain.

## BAB VI

### MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 7

- (1) Biro ORB melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan kedudukan penempatan pegawai dalam jabatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh BKD dan Biro ORB.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro ORB dapat berkoordinasi dengan SKPD/UKPD terkait.
- (4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro ORB.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 62128

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN, DAN KELUARGA BERENCANA

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI								KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PEGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL				
		3	4	5	6	7	8			
1	2	1								
1	Kepala Badan									
2	Sekretaris Badan		1							
	a. Kepala Subbagian Umum			1						
	1) Pengurus Barang				1					
	2) Penyimpan Barang					1				
	3) Pengolah Umum					4				
	4) Pengadministrasi Umum					4				
	5) Pengadministrasi Pimpinan					2				
	6) Arsiparis						1			
	b. Kepala Subbagian Kepegawaian			1						
	1) Pengelola Kepegawaian				2					
	2) Pengolah Kepegawaian				3					
	3) Pengadministrasi Kepegawaian				1					
	c. Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran			1						
	1) Pengelola Perencanaan dan Anggaran				3					
	2) Pengolah Perencanaan dan Anggaran				2					
	3) Pengadministrasi Perencanaan dan Anggaran				2					
	d. Kepala Subbagian Keuangan			1						
	1) Bendahara Pengeluaran (APBN dan APBD)				2					
	2) Verifikator (APBN dan APBD)				3					
	3) Pengolah Data Keuangan (APBN dan APBD)				3					
	4) Pengadministrasi Keuangan (APBN dan APBD)				2					
3	Kepala Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat		1							
	a. Kepala Subbidang Sosial Budaya Masyarakat			1						
	1) Pengelola Sosial Budaya Masyarakat				2					
	2) Pengolah Sosial Budaya Masyarakat				1					
	3) Pengadministrasi Sosial Budaya Masyarakat				1					
	4) Penyiap				1					
	b. Kepala Subbidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan			1						
	1) Pengelola Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan				2					
	2) Pengolah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan				1					
	3) Pengadministrasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan				1					
	c. Kepala Subbidang Peningkatan Partisipasi Masyarakat			1						
	1) Pengelola Peningkatan Partisipasi Masyarakat				2					
	2) Pengolah Peningkatan Partisipasi Masyarakat				2					
	3) Pengadministrasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat				1					
4	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		1							
	a. Kepala Subbidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan			1						
	1) Pengelola Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan				2					



NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PECAWAI							KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL			
1	2	3	4	5	6	7	8		
	2) Pengolah Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan				1				
	3) Pengadministrasi Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan				1				
	b. Kepala Subbidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak			1					
	1) Pengelola Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak				2				
	2) Pengolah Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak				2				
	3) Pengadministrasi Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak				1				
	4) Penyiap Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak				1				
	c. Kepala Subbidang Pengarusutamaan Gender			1					
	1) Pengelola Pengarusutamaan Gender				2				
	2) Pengolah Pengarusutamaan Gender				1				
	3) Pengadministrasi Pengarusutamaan Gender				1				
5	Kepala Bidang Teknologi Tepat Guna dan Jaringan Informasi		1						
	a. Kepala Subbidang Pemasarakan dan Pemanfaatan			1					
	1) Pengelola Pemasarakan dan Pemanfaatan				2				
	2) Pengolah Pemasarakan dan Pemanfaatan				1				
	3) Pengadministrasi Pemasarakan dan Pemanfaatan				1				
	b. Kepala Subbidang Pengembangan Sumber Daya dan Usaha Masyarakat			1					
	1) Pengelola Pengembangan Sumber Daya dan Usaha Masyarakat				2				
	2) Pengolah Pengembangan Sumber Daya dan Usaha Masyarakat				1				
	3) Pengadministrasi Pengembangan Sumber Daya dan Usaha Masyarakat				1				
	c. Kepala Subbidang Jaringan Informasi dan Data			1					
	1) Pengelola Jaringan Informasi dan Data				2				
	2) Pengolah Jaringan Informasi dan Data				1				
	3) Pengadministrasi Jaringan Informasi dan Data				1				
6	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi		1						
	a. Kepala Subbidang Pengendalian Kuantitas Penduduk dan Masalah Reproduksi			1					
	1) Pengelola Pengendalian Kuantitas Penduduk dan Masalah Reproduksi				2				
	2) Pengolah Pengendalian Kuantitas Penduduk dan Masalah Reproduksi				1				
	3) Pengadministrasi Pengendalian Kuantitas Penduduk dan Masalah Reproduksi				1				
	b. Kepala Subbidang Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus			1					
	1) Pengelola Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus				2				
	2) Pengolah Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus				2				
	3) Pengadministrasi Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus				1				
	c. Kepala Subbidang Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah dan Swasta			1					
	1) Pengelola Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah dan Swasta				2				
	2) Pengolah Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah dan Swasta				4				
	3) Pengadministrasi Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah dan Swasta				2				
7	Kepala Bidang Penggerakan dan Pembangunan Keluarga		1						
	a. Kepala Subbidang Pendampingan Keluarga			1					
	1) Pengelola Pendampingan Keluarga				2				
	2) Pengolah Pendampingan Keluarga				1				
	3) Pengadministrasi Pendampingan Keluarga				1				
	4) Penyiap Berkas				1				
	b. Kepala Subbidang Promosi dan Penggerakan Keluarga			1					
	1) Pengelola Promosi dan Penggerakan Keluarga				2				
	2) Pengolah Promosi dan Penggerakan Keluarga				1				
	3) Pengadministrasi Promosi dan Penggerakan Keluarga				1				
	c. Kepala Subbidang Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			1					
	1) Pengelola Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				2				

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI						KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL		
		3	4	5	6	7	8	
1	2							
	2) Pengolah Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				1			
	3) Pengadministrasi Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				1			
8	Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Administrasi Jakarta Pusat		1					
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1				
	1) Bendahara				1			
	2) Pengurus Barang				1			
	3) Verifikator				1			
	4) Pengolah Perencanaan dan Anggaran				2			
	5) Pengadministrasi Umum				2			
	6) Pengadministrasi Pimpinan				1			
	b. Kepala Subbidang Teknologi Tepat Guna			1				
	1) Pengolah Teknologi Tepat Guna				2			
	2) Pengolah Teknologi Tepat Guna				1			
	3) Pengadministrasi Teknologi Tepat Guna				1			
	c. Kepala Subbidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			1				
	1) Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				2			
	2) Pengolah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				1			
	3) Pengadministrasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				1			
	d. Kepala Subbidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat			1				
	1) Pengelola Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat				2			
	2) Pengolah Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat				1			
	3) Pengadministrasi Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat				1			
9	Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Administrasi Jakarta Utara		1					
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1				
	1) Bendahara				1			
	2) Pengurus Barang				1			
	3) Verifikator				1			
	4) Pengolah Perencanaan dan Anggaran				2			
	5) Pengadministrasi Umum				2			
	6) Pengadministrasi Pimpinan				1			
	b. Kepala Subbidang Teknologi Tepat Guna			1				
	1) Pengolah Teknologi Tepat Guna				2			
	2) Pengolah Teknologi Tepat Guna				1			
	3) Pengadministrasi Teknologi Tepat Guna				1			
	c. Kepala Subbidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			1				
	1) Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				2			
	2) Pengolah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				1			
	3) Pengadministrasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				1			
	d. Kepala Subbidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat			1				
	1) Pengelola Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat				2			
	2) Pengolah Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat				1			
	3) Pengadministrasi Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat				1			
10	Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Administrasi Jakarta Barat		1					
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1				
	1) Bendahara				1			
	2) Pengurus Barang				1			
	3) Verifikator				1			
	4) Pengolah Perencanaan dan Anggaran				2			
	5) Pengadministrasi Umum				2			

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI						KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL		
		3	4	5	6	7	8	
1	2							
	6) Pengadministrasi Pimpinan				1			
	b. Kepala Subbidang Teknologi Tepat Guna			1				
	1) Pengelola Teknologi Tepat Guna				2			
	2) Pengolah Teknologi Tepat Guna				1			
	3) Pengadministrasi Teknologi Tepat Guna				1			
	c. Kepala Subbidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			1				
	1) Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				2			
	2) Pengolah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				1			
	3) Pengadministrasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				1			
	d. Kepala Subbidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat			1				
	1) Pengelola Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat				2			
	2) Pengolah Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat				1			
	3) Pengadministrasi Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat				1			
11	Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Administrasi Jakarta Selatan		1					
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1				
	1) Bendahara				1			
	2) Pengurus Barang				1			
	3) Verifikator				1			
	4) Pengolah Perencanaan dan Anggaran				2			
	5) Pengadministrasi Umum				2			
	6) Pengadministrasi Pimpinan				1			
	b. Kepala Subbidang Teknologi Tepat Guna			1				
	1) Pengelola Teknologi Tepat Guna				2			
	2) Pengolah Teknologi Tepat Guna				2			
	3) Pengadministrasi Teknologi Tepat Guna				1			
	c. Kepala Subbidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			1				
	1) Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				2			
	2) Pengolah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				2			
	3) Pengadministrasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				1			
	d. Kepala Subbidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat			1				
	1) Pengelola Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat				2			
	2) Pengolah Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat				2			
	3) Pengadministrasi Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat				1			
12	Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Administrasi Jakarta Timur		1					
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1				
	1) Bendahara				1			
	2) Pengurus Barang				1			
	3) Verifikator				1			
	4) Pengolah Perencanaan dan Anggaran				2			
	5) Pengadministrasi Umum				2			
	6) Pengadministrasi Pimpinan				1			
	7) Penyiap Berkas				1			
	b. Kepala Subbidang Teknologi Tepat Guna			1				
	1) Pengelola Teknologi Tepat Guna				2			
	2) Pengolah Teknologi Tepat Guna				1			
	3) Pengadministrasi Teknologi Tepat Guna				1			
	c. Kepala Subbidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			1				
	1) Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				2			
	2) Pengolah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				1			

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI						KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL		
		3	4	5	6	7	8	
1	2							
	3) Pengadministrasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				1			
	d. Kepala Subbidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat							
	1) Pengelola Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat				2			
	2) Pengelola Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat				1			
	3) Pengadministrasi Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat				1			
13	Kepala Kantor Keluarga Berencana Kota Administrasi Jakarta Pusat		1					
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha							
	1) Bendahara Pengeluaran				1			
	2) Pengolah Data Keuangan				3			
	3) Pengurus Barang				1			
	4) Penyimpan Barang				1			
	5) Pengolah Kepegawaian				2			
	6) Pengolah Perencanaan dan Anggaran				2			
	7) Verifikator				2			
	8) Pengadministrasi Umum				1			
	9) Pengadministrasi Pimpinan							
	b. Kepala Subbidang Jaringan Informasi dan Data			1				
	1) Pengelola Jaringan Informasi dan Data				1			
	2) Pengolah Jaringan Informasi dan Data				3			
	3) Pengadministrasi Jaringan Informasi dan Data				1			
	c. Kepala Subbidang Penggerakan dan Pembangunan Keluarga			1				
	1) Pengelola Penggerakan dan Pembangunan Keluarga				3			
	2) Pengelola Penggerakan dan Pembangunan Keluarga				2			
	3) Pengadministrasi Penggerakan dan Pembangunan Keluarga				1			
	d. Kepala Subbidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi			1				
	1) Pengelola Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				2			
	2) Pengelola Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				1			
	3) Pengadministrasi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				3			
	e. Kepala Seksi Kecamatan / PPLKB Kecamatan			8				
	1) Pengelola Penggerak dan Pendampingan KB Kecamatan				8			
	2) Pengadministrasi Umum Kecamatan				8			
	3) Pengolah Penggerak dan Pendampingan Pengendalian Penduduk dan KB Kelurahan				44			
14	Kepala Kantor Keluarga Berencana Kota Administrasi Jakarta Utara		1					
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha							
	1) Bendahara Pengeluaran				1			
	2) Pengolah Data Keuangan				3			
	3) Pengurus Barang				1			
	4) Penyimpan Barang				1			
	5) Pengolah Kepegawaian				2			
	6) Pengolah Perencanaan dan Anggaran				2			
	7) Verifikator				2			
	8) Pengadministrasi Umum				1			
	9) Pengadministrasi Pimpinan							
	b. Kepala Subbidang Jaringan Informasi dan Data			1				
	1) Pengelola Jaringan Informasi dan Data				1			
	2) Pengolah Jaringan Informasi dan Data				3			
	3) Pengadministrasi Jaringan Informasi dan Data				1			
	c. Kepala Subbidang Penggerakan dan Pembangunan Keluarga			1				
	1) Pengelola Penggerakan dan Pembangunan Keluarga				3			

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI						KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL		
		3	4	5	6	7	8	
	2							
	2) Pengolah Penggerak dan Pembangunan Keluarga				2			
	3) Pengadministrasi Penggerak dan Pembangunan Keluarga				1			
	d. Kepala Subbidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi			1				
	1) Pengelola Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				2			
	2) Pengelola Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				1			
	3) Pengadministrasi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi			6	3			
	e. Kepala Seksi Kecamatan / PPLKB Kecamatan							
	1) Pengelola Penggerak dan Pendampingan KB Kecamatan				6			
	2) Pengadministrasi Umum Kecamatan				6			
	3) Pengolah Penggerak dan Pendampingan Pengendalian Penduduk dan KB Kelurahan		1		31			
15	Kepala Kantor Keluarga Berencana Kota Administrasi Jakarta Barat							
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1				
	1) Bendahara Pengeluaran				1			
	2) Pengolah Data Keuangan				3			
	3) Pengurus Barang				1			
	4) Penyimpan Barang				1			
	5) Pengolah Kepegawaian				1			
	6) Pengolah Perencanaan dan Anggaran				2			
	7) Verifikator				2			
	8) Pengadministrasi Umum				2			
	9) Pengadministrasi Pimpinan				1			
	10) Penyiap Berkas			1	1			
	b. Kepala Subbidang Jaringan Informasi dan Data							
	1) Pengelola Jaringan Informasi dan Data				1			
	2) Pengolah Jaringan Informasi dan Data				3			
	3) Pengadministrasi Jaringan Informasi dan Data				1			
	c. Kepala Subbidang Penggerak dan Pembangunan Keluarga			1				
	1) Pengelola Penggerak dan Pembangunan Keluarga				3			
	2) Pengolah Penggerak dan Pembangunan Keluarga				2			
	3) Pengadministrasi Penggerak dan Pembangunan Keluarga				1			
	d. Kepala Subbidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi			1				
	1) Pengelola Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				2			
	2) Pengolah Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				1			
	3) Pengadministrasi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi			8	3			
	e. Kepala Seksi Kecamatan / PPLKB Kecamatan							
	1) Pengelola Penggerak dan Pendampingan KB Kecamatan				8			
	2) Pengadministrasi Umum Kecamatan				8			
	3) Pengolah Penggerak dan Pendampingan Pengendalian Penduduk dan KB Kelurahan		1		56			
16	Kepala Kantor Keluarga Berencana Kota Administrasi Jakarta Selatan							
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1				
	1) Bendahara Pengeluaran				1			
	2) Pengolah Data Keuangan				3			
	3) Pengurus Barang				1			
	4) Penyimpan Barang				1			
	5) Pengolah Kepegawaian				1			
	6) Pengolah Perencanaan dan Anggaran				2			
	7) Verifikator				2			
	8) Pengadministrasi Umum				2			
	9) Pengadministrasi Pimpinan				1			

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI						KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI 3	JABATAN ADMINISTRATOR 4	JABATAN PEGAWAS 5	JABATAN PELAKSANA 6	JABATAN FUNGSIONAL 7	8	
1	2							
	10) Penyiap Berkas			1	1			
	b. Kepala Subbidang Jaringan Informasi dan Data							
	1) Pengelola Jaringan Informasi dan Data				3			
	2) Pengolah Jaringan Informasi dan Data				1			
	3) Pengadministrasi Jaringan Informasi dan Data			1				
	c. Kepala Subbidang Penggerakan dan Pembangunan Keluarga							
	1) Pengelola Penggerakan dan Pembangunan Keluarga				3			
	2) Pengelola Penggerakan dan Pembangunan Keluarga				2			
	3) Pengadministrasi Penggerakan dan Pembangunan Keluarga			1	1			
	d. Kepala Subbidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi							
	1) Pengelola Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				2			
	2) Pengelola Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				1			
	3) Pengadministrasi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				3			
	e. Kepala Seksi Kecamatan / PPLKB Kecamatan			10				
	1) Pengelola Penggerak dan Pendampingan KB Kecamatan				10			
	2) Pengadministrasi Umum Kecamatan				10			
	3) Pengolah Penggerak dan Pendampingan Pengendalian Penduduk dan KB Kelurahan				65			
17	Kepala Kantor Keluarga Berencana Kota Administrasi Jakarta Timur	1		1				
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha				1			
	1) Bendahara Pengeluaran				3			
	2) Pengolah Data Keuangan				1			
	3) Pengurus Barang				1			
	4) Penyimpan Barang				1			
	5) Pengolah Kepegawaian				2			
	6) Pengolah Perencanaan dan Anggaran				2			
	7) Verifikator				2			
	8) Pengadministrasi Umum				1			
	9) Pengadministrasi Pimpinan				1			
	10) Penyiap Berkas			1				
	b. Kepala Subbidang Jaringan Informasi dan Data							
	1) Pengelola Jaringan Informasi dan Data				1			
	2) Pengolah Jaringan Informasi dan Data				3			
	3) Pengadministrasi Jaringan Informasi dan Data				1			
	c. Kepala Subbidang Penggerakan dan Pembangunan Keluarga			1				
	1) Pengelola Penggerakan dan Pembangunan Keluarga				3			
	2) Pengelola Penggerakan dan Pembangunan Keluarga				2			
	3) Pengadministrasi Penggerakan dan Pembangunan Keluarga			1	1			
	d. Kepala Subbidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi							
	1) Pengelola Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				2			
	2) Pengelola Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				1			
	3) Pengadministrasi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				4			
	e. Kepala Seksi Kecamatan / PPLKB Kecamatan			10				
	1) Pengelola Penggerak dan Pendampingan KB Kecamatan				10			
	2) Pengadministrasi Umum Kecamatan				10			
	3) Pengolah Penggerak dan Pendampingan Pengendalian Penduduk dan KB Kelurahan				65			
18	Kepala Kantor PMPKB Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	1						
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha							
	1) Bendahara Pengeluaran				1			
	2) Pengolah Data Keuangan							

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI								KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI 3	JABATAN ADMINISTRATOR 4	JABATAN PENGAWAS 5	JABATAN PELAKSANA 6	JABATAN FUNGSIONAL 7				
1	2									8
	3) Pengurus Barang				1					
	4) Pengadministrasi Umum				2					
	5) Pengolah Penggerak dan Pendampingan Pengendalian Penduduk dan KB Kelurahan				6					
	b. Kepala Subbidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga			1						
	1) Pengelola Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				2					
	2) Pengadministrasi Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				2					
	c. Kepala Subbidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan			1						
	1) Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan				2					
	3) Pengadministrasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan				2					
	19 Kepala Pusat Pengembangan dan Pelatihan KB, PP dan PA		1							
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1						
	1) Bendahara				1					
	2) Pengolah Keuangan				1					
	3) Pengurus Barang				1					
	4) Verifikator				2					
	5) Pengolah Perencanaan dan Anggaran				2					
	6) Pengadministrasi Umum				2					
	7) Pengadministrasi Pimpinan				1					
	8) Penyiap Berkas				1					
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan PPPA						1			
	1) Pengolah Satuan Pelaksana Pelatihan						2			
	2) Pengadministrasi Satuan Pelaksana Pelatihan						2			
	c. Kepala Satuan Pelaksana Penelitian dan Pengembangan						1			
	1) Pengolah Satuan Pelaksana Penelitian dan Pengembangan						3			
	2) Pengadministrasi Satuan Pelaksana Penelitian dan Pengembangan						2			
	d. Kepala Satuan Pelaksana Pelatihan KB dan PK							1		
	1) Pengolah Satuan Pelaksana Pelatihan KB dan PK						3			
	2) Pengadministrasi Satuan Pelaksana Pelatihan KB dan PK						2			
	3) Penyiap Berkas						1			
	e. Jabatan Fungsional								4	
	1) Widyaiswara Pertama								2	
	2) Widyaiswara Muda								2	
	3) Widyaiswara Madya								3	
	JUMLAH	1	18	105	761		10			
	JUMLAH TOTAL				895					

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA